



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/478/KEP/02/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
13. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan SKPD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/478/KEP/02/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2014 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2014-2019

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat		
1.1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Usia Harapan Hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk dan merupakan ukuran keberhasilan di bidang pelayanan kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $eox = \frac{T(x)}{I(x)}$ dimana: eox = rata-rata umur (th. hidup) yang mungkin dicapai oleh suatu kohor penduduk hingga ulang tahun ke-1 T(x) = jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat 1 tahun I(x) = total tahun orang yang hidup setelah umur tepat 1 tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
1.2	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Gini	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini (G) antara 0 dan 1 (0<1). Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i Qi = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran sampai kelas ke-i G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang G > 0,3 = Ketimpangan tinggi</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BPS</p>
		<p>Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) merupakan ukuran keberhasilan di bidang pemerataan pendapatan antar wilayah kecamatan. Formulasi Pengukuran: $IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 \cdot f_i} \ln}{Y}$ dimana, untuk kabupaten/kota: <i>Y_i</i> = PDRB per kapita di kecamatan <i>i</i> <i>Y</i> = PDRB per kapita rata-rata kab/kota <i>F_i</i> = Jumlah penduduk di kecamatan <i>i</i> <i>n</i> = Jumlah penduduk di kab/kota Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BPS</p>
		<p>Persentase Penduduk miskin</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dan merupakan ukuran keberhasilan di bidang penanggulangan kemiskinan. Formulasi Pengukuran: $P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ dimana: <i>P</i> = Headcount Index atau persentase penduduk miskin <i>z</i> = Garis Kemiskinan <i>y_i</i> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<i>i</i>=1, 2, 3, ..., <i>q</i>), <i>y_i</i> < <i>z</i> <i>q</i> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan <i>n</i> = jumlah penduduk Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BPS</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
1.3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses terhadap Pendidikan	IPM	<p>Alasan Pemilihan Indikator: IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (<i>Longevity</i>), pengetahuan (<i>Knowledge</i>) dan standar hidup layak (<i>Decent Living</i>).</p> <p>Formulasi Pengukuran: $IPM = \frac{IHH + (IMH+ILS) + IDB}{3}$</p> <p>dimana:</p> <p><i>IHH</i> = Indeks Harapan Hidup penduduk usia 1 tahun</p> <p><i>IMH + ILS</i> = Indeks Melek Huruf dan Lama Sekolah</p> <p><i>IDB</i> = Indeks Daya Beli Masyarakat setempat</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
2	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah		
2.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Pertumbuhan PDRB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pertumbuhan PDRB adalah pertambahan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi di suatu wilayah, dan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p><i>t + 1</i> = tahun pengamatan PDRB</p> <p><i>T</i> = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		PDRB per kapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: PDRB per Kapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk dan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$ <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Laju inflansi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Laju inflansi adalah indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $[(1 + \Delta\text{Inf}_1)(1 + \Delta\text{Inf}_2)(1 + \Delta\text{Inf}_t)]^{1/t} - 1$ <i>dimana:</i> ΔInf = Perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = Periode pengamatan perubahan nilai inflasi</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\Delta\text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$ <i>dimana:</i> Inf_n = Nilai inflasi pada tahun n $\text{Inf}_{(n+1)}$ = Nilai pada 1 tahun berikutnya n = Tahun.....</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Rasio penduduk yang bekerja	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rasio Penduduk yang Bekerja merupakan ukuran keberhasilan pembangunan khususnya pada strategi pro-job atau pengarus-utamaan penciptaan lapangan kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disnakersostrans</p> <p>Sumber Data: BPS</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengeluaran Konsumsi Pangan per Kapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengeluaran Konsumsi Pangan per Kapita adalah memberikan informasi tentang pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keberhasilan pembangunan ekonomi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita adalah memberikan informasi tentang pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan non-pangan (barang tahan lama), dan merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan ekonomi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan} \times 100}{\text{Total Pengeluaran}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
2.2	Menguatnya Kontribusi Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nilai tukar petani	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai tukar petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$</p> <p>dimana: <i>NTP</i> = Nilai Tukar Petani <i>I_t</i> = Indeks harga yang diterima petani <i>I_b</i> = Indeks harga yang dibayar petani</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah		
3.1	Aksesabilitas antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Panjang Jalan</i> <i>Jumlah Kendaraan</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
4.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan		
4.1	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesenambungan Sumber Daya	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih merupakan ukuran keberhasilan pembangunan pada urusan perumahan. Air bersih (<i>clean water</i>) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum (<i>drinking water</i>) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah RT menggunakan air bersih x 100</i> <i>Jumlah RT</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: DPU dan ESDM</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Luas Wilayah Industri	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Wilayah/kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang. Luas wilayah industri merupakan ukuran keberhasilan pembangunan pada peningkatan daya saing daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah Luas Wilayah Industri x 100</i> <i>Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BAPPEDA</p>
5.	Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis		
5.1	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	Lama Proses Perijinan (Hari)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Lama Proses Perijinan merupakan indikator untuk mengukur transparansi dan kemudahan untuk investasi, serta daya saing daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BMPPT</p> <p>Sumber Data: BMPPT</p>
5.2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Opini BPK 'WTP'	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Sedangkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor menyekini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPPKAD</p> <p>Sumber Data: DPPKAD</p>
		<p>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sistem AKIP adalah satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi : perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal. Penilaian AKIP bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Formulasi Pengukuran: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda</p> <p>Sumber Data: Setda</p>
6.	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum		
6.1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Angka kriminalitas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Tinggi rendahnya angka kriminalitas mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>kondusifitas daerah, khususnya di bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun</i> $\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Satpol PP</p> <p>Sumber Data: Satpol PP</p>

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-
 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2014-2019

- NAMA SKPD : **SEKRETARIAT DAERAH**
 URUSAN : Otonomi Daerah
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan
 FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan		
1.1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat desa merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah aparat desa yang sudah didiklatkan}}{\text{jumlah seluruh aparat desa}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda</p> <p>Sumber Data: Bagian Tata Pemerintahan</p>

2.	Mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel		
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan (SAP). Dalam Pasal 20 PP 8/2006 ada tambahan, bahwa selain terintegrasi dengan ketiga sistem tersebut, SAKIP juga perlu terintegrasi dengan sistem perbendaharaan. Sistem AKIP adalah satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi : perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal. Penilaian AKIP bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. <p>Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda</p> <p>Sumber Data: Bagian Organisasi</p>
3.	Mewujudkan penyusunan, penataan, dan penyelesaian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
3.1	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga dapat dilaksanakan secara efektif guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{produk hukum yang sesuai perundang - undangan}}{\text{jumlah produk hukum}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda</p>

	supremasi hukum.		Sumber Data: Bagian Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Mewujudkan kebijakan di bidang perekonomian yang berwawasan kerakyatan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif daerah		
4.1.	Meningkatnya pembangunan ekonomi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; 2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Bagian Perekonomian</p>
5.	Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah		
5.1	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabel dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Akuntabilitas Kinerja meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran. Sedangkan analisis keuangan berisi alokasi dan sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{laporan keuangan dan kinerja yang disusun}}{\text{jumlah seluruh laporan keuangan dan kinerja yang seharusnya disusun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda Kab. Magelang</p>

			Sumber Data: Bagian Adm. Pemb. Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat		
6.1.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	Alasan Pemilihan Indikator: Guna peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan tentang koordinasi penyusunan kebijakan terutama bidang pendidikan agama, seni budaya serta peningkatan wawasan bagi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Megelang Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah peserta kaffilah yang dikirim}}{\text{jumlah kategori yang diadakan}} \times 100 \%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Setda Kab. Magelang Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat
7.	Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi kehumasan dan keprotokoleran dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara efektif dan professional		
7.1	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	Alasan Pemilihan Indikator: Kerjasama dengan media masa merupakan salah satu kunci dari peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dalam rangka peningkatan pembangunan daerah. Kualitas informasi yang berimbang dan bertanggungjawab akan memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintah daerah Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah informasi yang disajikan}}{\text{jumlah informasi yang seharusnya disajikan}} \times 100 \%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Setda Kab. Magelang Sumber Data: Bagian Humas dan Protokol
8.	Mengoptimalkan kualitas pelayanan bidang sarana prasarana umum untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Pimpinan, melalui pemberian dukungan keuangan, rumah tangga, persandian, perlengkapan, dan		
8.1.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur di lingkup Setda	Alasan Pemilihan Indikator: Sarana prasarana aparatur merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kinerja aparatur Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{jumlah sarana prasarana yang seharusnya tersedia}} \times 100 \%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab:

keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah	Setda Kab. Magelang Sumber Data: Bagian Umum
--	---

- NAMA SKPD : **SEKRETARIAT DPRD**
- URUSAN : Otonomi Daerah
- TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya profesionalisme SDM aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRD		
1.1.	Meningkatnya SDM Aparatur yang lebih profesional dan sistem administrasi yang efektif	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM Aparatur di Sekretariat DPRD merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung kinerja DPRD</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah aparatur daerah yang mengikuti Bimtek}}{\text{jumlah keseluruhan aparatur di Setwan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Sekretariat DPRD</p> <p>Sumber Data: Sekretariat DPRD</p>
2.	Terwujudnya kinerja DPRD yang lebih tertib dan responsive		
2.1.	Terciptanya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel	Jumlah Perda yang ditetapkan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kepastian Hukum bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun berjalan</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p>

			SKPD Penanggungjawab: Sekretariat DPRD Sumber Data: Sekretariat DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya kebebasan masyarakat untuk berbicara dan beraspirasi kepada Anggota DPRD		
3.1.	Meningkatnya penyebaran informasi bagi masyarakat tentang kinerja DPRD	Jumlah tabloid Suarakyat yang diterbitkan	Alasan Pemilihan Indikator: Kinerja DPRD Kabupaten Magelang disebarluaskan ke Masyarakat Formulasi Pengukuran: Jumlah terbit Suarakyat pada tahun berjalan Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: SekretariatDPRD Sumber Data: Sekretariat DPRD

NAMA : **INSPEKTORAT**
SKPD

URUSA N : Otonomi Daerah

TUGAS : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
POKOK pemerintah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

FUNGSI : 1. Perencanaan program pengawasan; Per
I
2. umusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; Per
3. meriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas Pe
pengawasan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan		
1.1.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan	Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui jumlah aparatur pengawasan yang telah memiliki sertifikasi</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah APIP yang bersertifikasi}}{\text{jumlah APIP}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Inspektorat</p> <p>Sumber Data: Inspektorat</p>
2.	Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang		
2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Persentase jumlah unit kerja yang dilakukan pemeriksaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui unit kerja yang dilakukan pemeriksaan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah unit kerja yang diperiksa}}{\text{jumlah unit kerja di Kab. Magelang}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Inspektorat</p>

			Sumber Data: Inspektorat
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut yang ditangani Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah status tindak lanjut yang ditangani}}{\text{jumlah temuan hasil pemeriksaan}} \times 100 \%$ Tipe Perhitungan: Komulatif SKPD Penanggungjawab: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat

NAMA SKPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

URUSAN : Perencanaan Pembangunan dan Statistik

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistic

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan		
1.1.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Alasan Pemilihan Indikator: RPJMD merupakan pedoman perencanaan pembangunan selama lima tahunan Formulasi Pengukuran: Ada / Tidak Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BAPPEDA
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Alasan Pemilihan Indikator: RKPD merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Formulasi Pengukuran: Ada / Tidak Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BAPPEDA

(1)	(2)	(3)	(4)
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKP	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah program RKP}}{\text{tahun berkenaan}} \times 100\%$ jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BAPPEDA</p>
		Tersedianya Buku Kabupaten dalam Angka	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sumber data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: Ada / Tidak</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BAPPEDA</p>
		Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sumber data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: Ada / Tidak</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BAPPEDA</p>

- NAMA SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
- URUSAN : Otonomi Daerah
- TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang kepegawaian.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berintegritas		
1.1.	Peningkatan kompetensi, kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang berintegritas,	Cakupan PNS yang mengikuti diklat, bimtek, pelayanan administrasi belajar, dan tugas belajar.	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Formulasi Pengukuran: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan Tugas Belajar Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BKD Sumber Data: BKD
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan.	Alasan Pemilihan Indikator: Mendukung pelaksanaan penataan jabatan struktural Formulasi Pengukuran: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BKD Sumber Data: BKD

(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	Peningkatan sistem pola karier yang jelas dan terukur.	Prosentase terisinya jabatan struktural dan fungsional.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mendukung peningkatan kinerja pada organisasi perangkat daerah .</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah jabatan yang terisi}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BKD</p> <p>Sumber Data: BKD</p>

- NAMA SKPD : **KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
 URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 TUGAS POKOK : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (AlasanPemilihanIndikator, FormulasiPengukuran, TipePenghitungan, SKPD Penanggungjawab, danSumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kegiatan masyarakat untuk memupuk wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme, serta menghindari terjadinya konflik ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan		
1.1.	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui kondusifitas Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Kasus/kejadian yang ada di wilayah Kabupaten Magelang</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif dalam 1 tahun berjalan</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kesbangpol, Polres dan Kodim</p> <p>Sumber Data: Kesbangpol, Polres dan Kodim</p>
1.2	Mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakkan hak asasi manusia	Pengembangan wawasan kebangsaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan 4 pilar kebangsaan</p> <p>FormulasiPengukuran: Jumlah Peserta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan</p> <p>TipePerhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kesbangpol dan Kodim</p> <p>Sumber Data: Kesbangpol dan Kodim</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembinaan politik masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai penambahan wawasan terhadap budaya politik masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kesbangpol</p> <p>Sumber Data: Kesbangpol</p>

- NAMA SKPD : **BADAN LINGKUNGAN HIDUP**
- URUSAN : Lingkungan Hidup
- TUGAS POKOK : Menyusun dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang lingkungan hidup.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		
1.1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen Lingkungan dan Kualitas Laboratorium Lingkungan	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah usaha dan / atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup</p>
		Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Sumber Data:</p>

			Badan Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
		Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah perusahaan yang wajib UKL - UPL yang diawasi}}{\text{jumlah perusahaan wajib UKL - UPL}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BadanLingkunganHidup</p> <p>Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup</p>
2.	Terwujudnya kebijakan, pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan		
2.1	Terlaksananya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air}}{\text{jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup</p>

- NAMA SKPD : **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**
- URUSAN : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- TUGAS POKOK : Menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol		
1.1.	Mantapnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya serta meningkatnya kesadaran bagi masyarakat akan arti pentingnya keluarga sehat dan sejahtera.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya mengetahui perkembangan rata-rata jumlah anak setiap keluarga untuk pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah anak}}{\text{jumlah keluarga}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB</p> <p>Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB</p>
		Rasio Akseptor KB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya peningkatan peserta KB dikalangan masyarakat untuk mengontrol pertumbuhan penduduk</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah akseptor KB}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p>

			Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)
		Cakupan peserta KB aktif	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui jumlah akseptor KB yang masih aktif mengingat angka drop out KB yang masih tinggi Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah peserta program KB aktif}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
		Cakupan Keluarga Prasejahtera	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui penurunan jumlah keluarga prasejahtera yang meningkat menjadi keluarga sejahtera I Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah keluarga prasejahtera}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
		Cakupan Keluarga Sejahtera I	Alasan Pemilihan Indikator: Masih tingginya keluarga prasejahtera sehingga perlu mengetahui apakah dengan hasil pembangunan yang dicapai mampu mengangkat menjadi keluarga sejahtera I Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah keluarga sejahtera I}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak		
2.1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam berbagai bidang kehidupan	Rasio KDRT	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya mengetahui kasus kekerasan yang terjadi per 1000 rumah tangga Formulasi Pengukuran:

			$\frac{\text{jumlah KDRT}}{\text{jumlah rumah tangga}} \times 1000$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif
(1)	(2)	(3)	(4)
			SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Alasan Pemilihan Indikator: Makin maraknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sehingga perlu mengetahui perkembangan penanganannya Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
3.	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berpartisipasi dalam pembangunan		
3.1.	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan institusi dan kelembagaan/komunitas masyarakat	Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Alasan Pemilihan Indikator: Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mendorong perwujudan masyarakat sejahtera, mandiri dan berperan serta dalam pembangunan Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{jumlah LPM}}$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB Sumber Data: Bapermas Perempuan dan KB
		Rata-rata kelompok binaan PKK	Alasan Pemilihan Indikator: PKK menjadi wadah perempuan untuk menunjukkan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{jumlah PKK}}$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Bapermas Perempuan dan KB

		Sumber Data: BapermasPerempuandan KB dan TP PKK Kabupaten
--	--	---

- NAMA SKPD : **KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
- URUSAN : Perpustakaan dan Kearsipan
- TUGAS POKOK : Menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat.		
1.1.	Meningkatnya penguasaan IPTEK dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca	Jumlah perpustakaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Magelang dapat memberikan gambaran yang terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah perpustakaan yang ada pada tahun (n) tertentu</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kantor perpustakaan dan arsip</p> <p>Sumber Data: Kantor perpustakaan dan arsip</p>
		Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rasio Keberadaan jumlah koleksi yang ada dapat memberikan gambaran yang terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan}}{\text{jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kantor perpustakaan dan arsip</p> <p>Sumber Data:</p>

			Kantor perpustakaan dan arsip
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah pengunjung perpustakaan (orang/tahun)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah pengunjung perpustakaan dapat memberikan gambaran terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun (n) tertentu</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kantor perpustakaan dan arsip</p> <p>Sumber Data: Kantor perpustakaan dan arsip</p>
2.	Meningkatnya Manajemen dan sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan Publik dengan standar Pelayanan Minimal		
2.1	Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik.	Prosentase unit pengolah (UP) yang menerapkan arsip secara baku	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah unit pengolah yang menerapkan sistem administrasi kearsipan dapat memberikan gambaran terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah UP yang menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah UP}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kantor perpustakaan dan arsip</p> <p>Sumber Data: Kantor perpustakaan dan arsip</p>
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun tertentu (n) dapat memberikan gambaran yang terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah pengelola kearsipan pada tahun tertentu (n)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kantor perpustakaan dan arsip</p> <p>Sumber Data: Kantor perpustakaan dan arsip</p>

- NAMA SKPD : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**
- URUSAN : Kesehatan
- TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit		
1.1.	Meningkatnya mutu pelayanan disetiap Unit Pelayanan Rumah Sakit	Kepuasan pelanggan rumah sakit	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator <i>out come</i> pelayanan rumah sakit yang tertuang dalm SPMRS yang menggambarkan persepsi pelanggan terhadap mutu pelayanan RS</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei}}{\text{jumlah total pasien yang di survei}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: RSUD Muntilan</p> <p>Sumber Data: RSUD Muntilan</p>
2.	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit Yang Profesional		
2.1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya rumah sakit yang profesional	Cost Recovery	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator penting administrasi dan manajemen pada SPMRS yang menggambarkan efisiensi dan efektivitas serta tingkat kesehatan keuangan rumah sakit</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pendapatan fungsional rumah sakit}}{\text{jumlah pembelanjaan operasional}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: RSUD Muntilan</p>

			Sumber Data: RSUD Muntilan
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatkan Profesionalisme SDM Sesuai Bidang Tugasnya		
3.1	Meningkannya profesionalisme SDM di setiap unit pelayanan rumah sakit sesuai bidang tugasnya	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator terkait SDM pada SPMRS pada dimensi kompetensi teknis dan menggambarkan kepedulian RS terhadap kualitas SDM</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun}}{\text{jumlah seluruh karyawan rumah sakit}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: RSUD Muntilan</p> <p>Sumber Data: RSUD Muntilan</p>
4	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		
4.1	Meningkatnya cakupan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang	Rata-rata kunjungan poliklinik per hari	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator yang menunjukkan pemanfaatan pelayanan rawat jalan rumah sakit oleh masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kunjungan poliklinik}}{\text{jumlah hari buka klinik}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: RSUD Muntilan</p> <p>Sumber Data: RSUD Muntilan</p>
		Bed Occupancy Rate (BOR)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator yang menggambarkan pemanfaatan tempat tidur rumah sakit</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{jumlah TT x jumlah hari dalam satu periode}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: RSUD Muntilan</p> <p>Sumber Data: RSUD Muntilan</p>

- NAMA SKPD : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas SDM, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menciptakan aparatur Polisi Pamong Praja yang kompeten dan professional		
1.1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana prasarana dan kemampuan personil dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah personil Satpol PP yang belum memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Satpol PP</p> <p>Sumber Data: Satpol PP</p>
2.	Menciptakan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum daerah		
2.1	Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang ditegakkan belum sesuai dengan target yang telah ditentukan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian penegakan Peraturan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Peraturan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Satpol PP</p>

			Sumber Data: Satpol PP
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Memperkuat koordinasi lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan ketertiban umum.		
3.1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	Cakupan petugas Linmas per 10.000 penduduk	Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah personil Linmas belum seimbang dengan jumlah penduduk Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Satpol PP Sumber Data: Satpol PP

- NAMA SKPD : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
 URUSAN : Pendidikan
 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan, kesempatan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan		
1.1.	Kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan	APK PAUD	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang PAUD di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah peserta didik jenjang PAUD}}{\text{Penduduk usia 4 - 6 tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SD/MI/Paket A di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah siswa jenjang SD/ MI /Paket A usia 7 - 12 tahun}}{\text{penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p>

			Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SMP/MTs/Paket B di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah siswa jenjang SMP/ MTs /Paket B usia 13 – 15 tahun}}{\text{penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah siswa jenjang SMA/ SMK/ MA / Paket B usia 16 – 18 tahun}}{\text{penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SD/MI/Paket A di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{penduduk usia 7 – 12 th}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p>

			Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SMP/MTs/Paket B di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{penduduk usia 13 – 15 th}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{penduduk usia 16 – 18 th}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Putus Sekolah SD/MI	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SD/MI</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah SD/MI}}{\text{jumlah siswa SD/MI seluruhnya}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p>

			Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SMP/MTs</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs}}{\text{jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah SMA/SMK/MA}}{\text{jumlah siswa SMA/SMK/MA seluruhnya}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SD/MI</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI yang lulus}}{\text{jumlah peserta Ujian SD/MI}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SMP/MTs</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs yang lulus}}{\text{jumlah peserta Ujian SMP/MTs}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/MA yang lulus}}{\text{jumlah peserta Ujian SMA/SMK/MA}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Nilai Rata-rata UN SD/MI	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SD/MI</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah nilai UN siswa SD/MI}}{\text{Jumlah Mapel UN SD/MI}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p>

			Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SMP/MTs Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah nilai UN siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah Mapel UN SMP/MTs}}$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
		Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah nilai UN siswa SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah Mapel UN SMA/SMK/MA}}$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kab. Magelang Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA berijazah kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah Guru Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kab. Magelang}}$ Tipe Perhitungan:

			<p>Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan jenjang SD/SDLB</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah ruang kelas SD/SLB sesuai SNP}}{\text{Jumlah ruang Kelas SD/SDLB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan jenjang SMP</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah ruang kelas SMP sesuai SNP}}{\text{Jumlah ruang Kelas SMP}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Sekolah SD/MI yang terakreditasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu SD/MI di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah lembaga SD/MI yang terakreditasi}}{\text{Jumlah SD/MI}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p>

			<p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Sekolah SMP/MTs yang terakreditasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu SMP/MTs di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah lembaga SMP/ MTs yang terakreditasi}}{\text{Jumlah SMP/MTs}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Sekolah SMA/MA/SMK yang terakreditasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu SMA/MA/SMK di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah lembaga SMA/ MA/ SMK yang terakreditasi}}{\text{Jumlah SMA/MA/SMK}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
2.1	Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga	Jumlah organisasi pemuda	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pemuda dan olahraga di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya dalam pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah organisasi pemuda dibawah pembinaan KNPI dan</p>

			<p>Disdikpora</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah organisasi olah raga	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pemuda dan olahraga di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah organisasi olah raga yang terdaftar dalam organisasi KONI</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Jumlah kegiatan kepemudaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pemuda dan olahraga di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan kepemudaan</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdikpora</p> <p>Sumber Data: Disdikpora</p>
		Jumlah kegiatan olahraga	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pemuda dan olahraga di Kab. Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya peran serta organisasi olahraga dalam pembangunan daerah di Kab. Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan olahraga di bawah pembinaan KONI</p> <p>Tipe Perhitungan:</p>

			Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdikpora Sumber Data: Disdikpora
--	--	--	--

NAMA SKPD : **DINAS KESEHATAN**
 URUSAN : Kesehatan
 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
 FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat.		
1.1.	Meningkatnya mutu pelayanan, akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Alasan Pemilihan Indikator: - Masuk dalam indikator MDG's - Merupakan indikator pembangunan kesehatan Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalindan nifas disatu wil kerja pada waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di satu wil. kerja dalam ukuran waktu yang sama}} \times 100.000$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang
		Jumlah Kematian Ibu	Alasan Pemilihan Indikator: - Masuk dalam indikator MDG's - Merupakan indikator pembangunan kesehatan Formulasi Pengukuran: Jumlah ibu yang meninggal karena bersalin dan nifas disatu wilayah kerja pada waktu tertentu

			<p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Kematian Bayi (AKB)	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masuk dalam indikator MDG's - Merupakan indikator pembangunan kesehatan <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{jumlah bayi (berumur < 1 tahun) yang meninggal disatu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama kerja}} \times 1.000$ <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>
		Angka Kematian Balita (AKABA)	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masuk dalam indikator MDG's - Merupakan indikator pembangunan kesehatan <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{jumlah anak berumur < 5 tahun yang meninggal disatu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 1.000$ <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>
		Prevalensi Balita gizi buruk	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masuk dalam indikator MDG's - Merupakan indikator pembangunan kesehatan <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{jumlah seluruh balita yang ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p>

			<p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Cakupan desa/ kelurahan universal child immunization (UCI)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: - Indikator pelayanan kesehatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan UCI}}{\text{seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>
		Persentase penemuan pasien baru TB BTA positif	<p>Alasan Pemilihan Indikator: - Masuk dalam indikator MDG's - Masuk indikator SPM</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun}}{\text{jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>
		Penderita DBD yang ditangani	<p>Alasan Pemilihan Indikator: - Masuk dalam indikator MDG's - Masuk indikator SPM</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayan dalam waktu satu tahun}}{\text{jumlah penderita DBD yang dtangani disatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Megalang</p>

- NAMA SKPD : **DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**
- URUSAN : Pertanian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan		
1.1.	Peningkatan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan	Produktivitas padi	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Meningkatkan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan menuju swasembada pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Produksi padi (ku)}}{\text{luas panen padi (ha)}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab: Distanbunhut</p> <p>Sumber Data: BPS dan Distanbunhut</p>
		Produktivitas jagung	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan menuju swasembada pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Produksi jagung (ku)}}{\text{luas panen jagung (ha)}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab : Distanbunhut</p> <p>Sumber Data :</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			BPS dan Distanbunhut
1.2	Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian	Luas lahan pertanian yang tersertifikasi (padi, kopi, kelapa, salak, sayuran, empon-empon)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Mendukung program Kepala Daerah yaitu Kabupaten Magelang menuju pertanian organik</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah luas lahan yang tersertifikasi organik sampai 5 tahun kedepan (ha)</p> <p>TipePerhitungan : Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab : Distanbunhut</p> <p>Sumber Data: Distanbunhut</p>
2.	Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana		
2.1	Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan hidup serta pengelolaan lahan kritis</p> <p>Formulasi Pengukuran : Luas lahan kritis – luas lahan kritis yang ditangani (ha)</p> <p>TipePerhitungan : Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab : Distanbunhut</p> <p>Sumber Data : Distanbunhut</p>

- NAMA SKPD : **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
- URUSAN : Pariwisata, Kebudayaan
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah		
1.1.	Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah	Kunjungan wisata	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merupakan Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata Pariwisata menjadi sektor unggulan setelah pertanian Sesuai dengan program nasional, Jawa Tengah menjadi 2 juta kunjungan wisman sampai dengan tahun 2019 <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisata se Kabupaten}}{\text{Jumlah Seluruh kunjungan wisata se kabupaten}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>
		Sektor pariwisata terhadap PDRB	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merupakan Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata Pariwisata menjadi sektor unggulan setelah pertanian Sesuai dengan program nasional, Jawa Tengah menjadi 2 juta kunjungan wisman

			sampai dengan tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dan sektor pariwisata se kabupaten}}{\text{jumlah PDRB}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>
2.	Terwujudnya Kualitas SDM dan Kehidupan Beragama Yang Semakin Meningkat		
2.1	Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah festival seni dan budaya</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>
		Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>
		Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa Pemerintah Daerah Wajib Melestarikan Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah benda situs dan cagar budya yang dilestarikan}}{\text{total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p>

		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
--	--	---

- NAMA SKPD : **DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI**
- URUSAN : Tenaga Kerja, Sosial, Transmigrasi
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggung jawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS dan kesetiakawanan sosial		
1.1.	Berkurangnya kualitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Alasan Pemilihan Indikator: Semakin banyak PMKS yang memperoleh Bansos maka semakin banyak peran pemerintah kabupaten dalam menangani permasalahan sosial Formulasi Pengukuran: $\frac{\sum \text{PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\sum \text{PMKS yang terdaftar}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggung jawab: Disnakersostrans Sumber Data: BPS, Data Disnakersostrans
	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	Alasan Pemilihan Indikator: Besarnya tenaga kerja atau pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mempunyai arti bahwa persediaan dan kebutuhan tenaga kerja dapat difasilitasi dengan baik sehingga meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang bekerja serta menurunkan jumlah pengangguran Formulasi Pengukuran: $\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif

			SKPD Penanggungjawab: Disnakersostrans Sumber Data: BPS, Data Disnakersostrans
(1)	(2)	(3)	(4)
		Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Alasan Pemilihan Indikator: Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, maka perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat dikurangi. Selain itu secara tidak langsung telah menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah Formulasi Pengukuran: $\frac{\sum \text{Perusahaan yang telah diperiksa}}{\sum \text{perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disnakersostrans Sumber Data: Disnakersostrans

- NAMA SKPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
- URUSAN : Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (AlasanPemilihanIndikator, FormulasiPengukuran, TipePenghitungan, SKPD Penanggungjawab, danSumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan		
1.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<p>AlasanPemilihanIndikator: Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur jalan</p> <p>FormulasiPengukuran: $\frac{\text{panjang jalan kondisi baik}}{\text{panjang jalan seluruhnya}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: DPU dan ESDM</p>
2	Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi		
	Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi	Persentase luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	<p>AlasanPemilihanIndikator: Persentase luas irigasi dalam kondisi baik memperlihatkan berjalannya pembangunan infrastruktur pengairan dan pelayanan irigasi</p> <p>FormulasiPengukuran: $\frac{\text{luas jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p>

			Sumber Data: DPU dan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
	Pendampingan dan penataan kawasan kumuh perkotaan, pengelolaan sanitasi, pengembangan SPAM, peningkatan infrastruktur drainase, penanganan kawasan permukiman rawan bencana, kawasan potensial dan pengembangan permukiman kawasan strategis	Permukiman layak huni	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase permukiman layak huni memperlihatkan pencapaian dari berbagai kegiatan di bidang permukiman.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{permukiman layak huni}}{\text{jumlah seluruh permukiman}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: DPU dan ESDM</p>
4	Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan sumber air tanah dan pencegahan resiko rawan bencana alam geologi serta terkendalinya kerusakan lingkungan.		
	Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat pengguna sumber daya alam untuk kesejahteraan baik pemanfaatan energi, pemanfaatan air Tanah, usaha SPBU, usaha Pangkalan MIGAS dan usaha Pertambangan	Jumlah unit-unit sumber EBT terbangun (digister biogas, PLTMH, PLTS, PLTB dsb)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah unit sumber energi baru terbarukan (EBT) menunjukkan adanya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat yang berkelanjutan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah unit energi baru terbarukan terbangun</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: DPU dan ESDM</p>
5	Tujuan : Mewujudkan peningkatan pelayanan kebersihan lingkungan		
	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan	Persentase penanganan sampah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Keberhasilan penanganan sampah merupakan indikasi dari keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{volume produksi sampah}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: DPU dan ESDM</p>

NAMA SKPD : **DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

URUSAN : Industri, Koperasi, UMKM

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Koperasi dan UMKM serta Aparatur Pembina		
1.1.	Menguatnya daya saing koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui Koperasi aktif dibandingkan jumlah koperasi yang telah berbadan hukum</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kopersi aktif}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disperinkopdan UMKM</p> <p>Sumber Data: Disperinkopdan UMKM</p>
		Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui Perkembangan Jumlah UKM non BPR</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disperinkopdan UMKM</p> <p>Sumber Data: Disperinkopdan UMKM</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase usaha mikro dan kecil	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui prosentase jumlah usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disperinkopdan UMKM</p> <p>Sumber Data: Disperinkopdan UMKM</p>
2	Berkembangnya Industri Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing Global		
2.1	Mewujudkan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui seberapa besar prosentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kontribusi PDRB sektor industri}}{\text{jumlah PDRB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disperinkop dan UMKM</p> <p>Sumber Data: BPS dan Disperinkopdan UMKM</p>
		Pertumbuhan Unit Usaha industri	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui kuantitas IKM tiap tahun</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri } (n-1)}{\text{jumlah industri } (n-1)} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disperinkopdan UMKM</p> <p>Sumber Data: BPS dan Disperinkopdan UMKM</p>
		Cakupan bina kelompok pengrajin	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui prosentase IKM yang telah terfasilitasi</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan binaan pemda tahun } n}{\text{jumlah jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disperinkopdan UMKM</p> <p>Sumber Data: Disperinkopdan UMKM</p>

NAMA SKPD : **DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR**
 URUSAN : Perdagangan
 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong Peningkatan deverifikasi Pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman kualitas dan produk ekspor		
1.1.	Meningkatnya kemampuan usah kelompok pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang usaha informal (IKK)	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan dan pengembangan pedagang kecil Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah kelompok pedagang yang mendapatkan pembinaan}}{\text{total kelompok pedagang informal}}$ Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdagsar Sumber Data: Disdagsar
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Magelang (IKK)	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{PDRB Bidang Perdagangan}}{\text{total PDRB}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdagsar Sumber Data: BPS dan Disdagsar
1.2	Meningkatnya nilai ekspor non migas	Nilai ekspor bersih (IKK)	Alasan Pemilihan Indikator: Formulasi Pengukuran: Nilai ekspor – Nilai impor Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab:

			Disdagsar Sumber Data: Disdagsar
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Devisa Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari jenis-jenis produk unggulan daerah yang memenuhi kualitas ekspor Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdagsar Sumber Data: Disdagsar

- NAMA SKPD : **DINAS PERHUBUNGAN**
- URUSAN : Perhubungan
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan berkeselamatan		
1.1.	Terpenuhinya pelayanan dan fasilitas angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan Indikator Pembangunan Perhubungan. Formulasi Pengukuran: Jumlah penumpang angkutan umum yang masuk terminal Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Dinas Perhubungan Sumber Data: Dinas Perhubungan
		Jumlah ijin trayek	Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan Indikator Pembangunan Perhubungan Formulasi Pengukuran: Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Dinas Perhubungan Sumber Data: Dinas Perhubungan

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Terminal Bus	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal. - Merupakan Indikator Pembangunan Perhubungan. <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah terminal Bus yang ada di Kabupaten Magelang</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Perhubungan</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>
2	Terciptanya kendaraan bermotor yang rendah emisi gas buang		
2.1	Terwujudnya kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji emisi	Rasio Uji Kendaraan Angkutan Umum	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan Indikator Pembangunan Perhubungan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kendaraan</i> / <i>jumlah kendaraan wajib uji kendaraan</i> x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Perhubungan</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>
Lama pengujian kelayakan angkutan umum		<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan Indikator Pembangunan Perhubungan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jangka waktu proses pengujian angkutan umum</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Perhubungan</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>	
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji		<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Formulasi Pengukuran: Ada / Tidak</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Perhubungan</p> <p>Sumber Data:</p>	

		Dinas Perhubungan
NAMA SKPD	:	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
URUSAN	:	Pertanian dan Perikanan
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas ternak dan ikan berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing		
1.1.	Makin membaiknya ketersediaan bahan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrument jaminan pangan pada tingkat masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi Hewan Ternak : <ol style="list-style-type: none"> a. Daging (Kg) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sapi 2. Kerbau 3. Kambing 4. Domba 5. Ayam ras pedaging 6. Ayam ras petelur 7. Ayam buras 8. Itik 9. Itik manila b. Telur (Kg) <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayam buras 2. Ayam ras petelur 3. Itik 4. Burung puyuh c. Susu (liter) <ol style="list-style-type: none"> Sapi perah 2) Angka konsumsi protein hewani (gr/kap/hari): <ol style="list-style-type: none"> a. Daging b. Telur 	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mendukung swasembada daging nasional dan konsumsi protein hewan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Berdasarkan Parameter Petunjuk Teknis Penghitungan Data dari Kementan dan Parameter Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dispeterikan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Statistik Dispeterikan Kab. Magelang</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		c. Susu	
1.2	Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan	1) Produksi perikanan benih (ekor) 2) Produksi perikanan budidaya (lauk/konsumsi) (ton) 3) Produksi perikanan tangkap (ton) 4) Angka konsumsi ikan (kg/kap/hari)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan program prioritas Bupati menjadikan Kabupaten Magelang sebagai sentra benih ikan tahun 2019</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statistik Budidaya Berdasarkan metode pengumpulan data statistik perikanan budidaya - Statistik Tangkap Berdasarkan metode analisis data statistik perikanan tangkap - Angka Konsumsi Ikan <p>Rumus : $= \frac{A+B-C+15\% \text{ Produksi Tercatat}}{D}$</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Hasil Produksi (segar & olahan yang dikonversi segar (Kg) B : Pemasukan Ikan dari Luar Daerah (segar & olahan yang sudah dikonversi segar) (Kg) C : Pengiriman ikan ke Luar Daerah (segar & olahan yang sudah dikonversi segar) (Kg) D : Jumlah Penduduk (orang) tahun 2009 -2013 (Data Statistik) <p>TipePerhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dispeterikan Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: Satatistik Dispeterikan Kab. Magelang</p>

NAMA SKPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

URUSAN : Kependudukan

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat		
1.1.	Meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk ber KTP dengan jumlah total penduduk berusia 17 tahun ke atas</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah penduduk usia > 17 th ber KTP}}{\text{jumlah penduduk usia 17 thn}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdukcapil</p> <p>Sumber Data: Disdukcapil</p>
		Rasio bayi berakte kelahiran	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rasio bayi berakte kelahiran digunakan untuk menghitung perbandingan antara jumlah bayi yang berakte dengan jumlah kelahiran bayi</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah bayi berakte}}{\text{jumlah kelahiran bayi}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disdukcapil</p>

			Sumber Data: Disdukcapil dan Dinas Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kepemilikan KTP	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator kepemilikan KTP digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk yg memiliki KTP dengan jumlah penduduk yang wajib KTP Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$ <i>(usia > 17 thndan atau/sudah menikah)</i> Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdukcapil Sumber Data: Disdukcapil
		Rasio pasangan berakte nikah	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator pasangan berakte nikah merupakan perbandingan antara jumlah pasangan nikah berakte nikah dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdukcapil Sumber Data: Disdukcapil
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator penerapan KTP nasional berbasis NIK digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah memiliki KTP nasional berbasis NIK Formulasi Pengukuran: Ada/Tidak Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Disdukcapil Sumber Data: Disdukcapil

NAMA SKPD : **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

URUSAN : Otonomi Daerah

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan professional		
1.1.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	Rancangan Perda dan Perda APBD selesai tepat waktu	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Pentingnya penyelesaian rancangan Perda dan Perda APBD tepat waktu karena Perda ini merupakan dasar pelaksanaan seluruh kegiatan di pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : -</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: DPPKAD Kab. Magelang</p>
		Opini BPK "WTP" terhadap laporan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Opini BPK "WTP" merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang telah berjalan secara transparan dan akuntabel</p> <p>Formulasi Pengukuran : -</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab : DPPKAD Kab. Magelang</p>

			Sumber Data : DPPKAD Kab. Magelang
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD yang akuntabel dan professional		
2.1	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan asset dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	Data inventaris aset sesuai dengan dengan neraca	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Data inventarisasi aset daerah yang baik dapat menunjang upaya pemanfaatan BMD dan optimalisasi investasi guna peningkatan PAD</p> <p>Formulasi Pengukuran : -</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab : DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: DPPKAD Kab. Magelang</p>
3.	Meningkatkan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya		
3.1	Optimalisasi potensi dan realisasi Pendapatan Daerah terutama dari komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase peningkatan PAD	<p>Alasan Pemilihan Indikator : PAD merupakan salah satu sumber dana utama untuk pembiayaan pelaksanaan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)}{(\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab : DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data : DPPKAD Kab. Magelang</p>
		Persentase peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator : PAD merupakan pendapatan daerah yang masih terus dapat digali dan ditingkatkan serta memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{(\text{porsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun } n) - (\text{porsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun } n - 1)}{(\text{porsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun } n - 1)} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab : DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data : DPPKAD Kab. Magelang</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur		
4.1	Peningkatan kualitas, profesionalisme, wawasan dan ketrampilan daam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Pelatihan lainnya	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Formulasi Pengukuran : Σ PNS yang mengikuti Bimtek, Diklat</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab : DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data : BKD dan DPPKAD Kab. Magelang</p>
		Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi dan latar belakang pendidikan dibidang Teknologi Informatika	<p>Alasan Pemilihan Indikator : DPPKAD sebagai pengelola SIM Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan dukungan pegawai yang berkopentensi di bidang IT</p> <p>Formulasi Pengukuran : Σ PNS yang mengikuti Bimtek, Diklat</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab : DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data : DPPKAD Kab. Magelang</p>
5.	Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas		
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum	Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Berkaitan dengan tugas DPPKAD sebagai pengelola Aset Daerah, agar pemanfaatan dan pemakaian BMD dapat lebih optimal</p> <p>Formulasi Pengukuran : -</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab : DPPKAD Kab. Magelang</p> <p>Sumber Data: DPPKAD Kab. Magelang</p>

NAMA SKPD : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
 URUSAN : Komunikasi dan Informatika
 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informasi dan telematika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Ketersediaan Teknologi Informasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (<i>good government</i>), Efektif dan Efisien.		
1.1.	Meningkatnya Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informatika sampai ke Desa serta Ketersediaan Teknologi Informasi yang Terintegrasi dalam Pelayanan Publik	Prosentase Desa yang Terkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika	Alasan Pemilihan Indikator : Untuk Peningkatan Cakupan Wilayah Kabupaten Magelang Yang Terfasilitasi Jaringan Teknologi Informasi Formulasi Pengukuran: $\frac{40}{370} \times 100\% : 0.1\%$ Jumlah Desa yang terkoneksi Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Diskominfo Sumber Data: Diskominfo
		Kapasitas Bandwidth Koneksi Bertambah	Alasan Pemilihan Indikator : Peningkatan Kecepatan Koneksi Internet Untuk Pelayanan diseluruh SKPD se Kab. Magelang Formulasi Pengukuran: 30 Mbps Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Diskominfo Sumber Data: Diskominfo

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Prosentase SKPD yang Aktif Menyajikan Berita dan Informasi Melalui Website Pemerintah Kabupaten Magelang</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Inpres RI No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government</p> <p>Formulasi Pengukuran: $1440/60 \times 100\% = 24\%$ SKPD yang aktif menyajikan berita</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Diskominfo</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
	<p>Terbukanya saluran informasi serta akses informasi secara timbal balik dari Pemerintah kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media komunikasi dan Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</p>	<p>Cakupan Diseminasi informasi/ kebijakan melalui kegiatan wahana komunikasi masyarakat (WKM)</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui jangkauan penyebaran informasi melalui media cetak</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah eksemplar media cetak yang dicetak untuk desiminasi informasi</p> <p>Tipe Perhitungan: Eksemplar Media Cetak Yang Dicitak Untuk Desiminasi Informasi Dengan Target Desiminasi Informasi (SKPD, 21 Kecamatan Dan 372 Desa/Kelurahan Serta Sekolah)</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Diskominfo</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		<p>Prosentase paparan informasi Nasional dan atau Kebijakan di Kabupaten Magelang pada masyarakat melalui pementasan media Pertunjukan Rakyat (Pentura)</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Memudahkan masyarakat memahami isi informasi yang disampaikan melalui media kesian</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah penonton yang dapat menyaksikan pementasan kesenian berdiseminasi</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Diskominfo</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Prosentase paparan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Magelang melalui media luar ruang</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan dan mendekatkan jumlah media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah tempat pemasangan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Diskominfo</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		<p>Cakupan Desiminasi Informasi Melalui Media Cetak</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatnya akses dan serapan informasi masyarakat melalui sebaran media cetak</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kelompok masyarakat yang dapat mengakses media informasi melalui media cetak</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Diskominfo</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
	<p>Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi</p>	<p>Prosentase Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang berizin</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Amanat Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Untuk Menciptakan Penataan Menara Telekomunikasi Yang Serasi Dan Seimbang Untuk Lingkungan, Serta Aman Dan Nyaman Bagi Warga Sekitar. <p>Formulasi Pengukuran: - Jumlah Menara Telekomunikasi yang dikendalikan dan diawasi</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Diskominfo</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN SALAMAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
1.1.	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Salaman</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan Peningkatan pelayanan administrasi umum dan perijinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dengan baik dan secara terpadu</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang ada}}{\text{Jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Salaman</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>

NAMA SKPD : **KECAMATAN BOROBUDUR**
 URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
 FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mendukung tugas fungsi SKPD melaksanakan pelayanan terpadu kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Borobudur</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Borobudur</p>
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan pembinaan dan fasilitasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mendukung tugas fungsi SKPD melaksanakan pembinaan</p>

		pengelolaan keuangan desa	penyelenggaraan pemerintah desa.
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran}}{\text{Jumlah anggaran dalam APBDes}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Borobudur</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Borobudur</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN NGLUWAR**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan penataan administrasi kependudukan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perubahan data dokumen KK/ KTP dan wajib KTP baru (umur 17 tahun)</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pemohon KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP (usia 17 ke atas)}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Ngluwar</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngluwar</p>
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan kualitas sumberdaya	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah</p>

	aparatur	keuangan daerah	daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab: Kecamatan Ngluwar</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngluwar</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN SALAM**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
1.1.	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan tugas pokok kecamatan di bidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan}}{\text{jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Salam</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salam</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatkan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi		
2.1	Peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi	Cakupan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Salam</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salam</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN SRUMBUNG**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat, lembaga desa dan kearifan lokal		
1.1.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat, lembaga desa dan kearifan lokal	Tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fungsi 1) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan merupakan isu strategis <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah perempuan yang hadir Musrenbang Desa se Kecamatan dibagi Jumlah peserta musrenbang Desa se Kecamatan) dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data:</p>

			Kecamatan dan Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat, lembaga desa dan kearifan lokal	Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fungsi 1) 2. Peningkatan swadaya masyarakat mendukung pembangunan desa <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah swadaya masyarakat se Kecamatan dibagi Jumlah realisasi proyek pembangunan se Kecamatan) dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan dan Desa</p>
2.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat		
2.1.	Berkurangnya resiko bencana dan/atau ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak pada masyarakat	Jumlah sosialisasi tramtibum bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban (fungsi 2) 2. Sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban umum bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam satu tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>
3.	Terwujudnya transparansi pemerintahan dan manajemen pengelolaan keuangan/ aset daerah yang lebih baik		
3.1.	Peningkatan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan/ aset daerah	Jumlah penertiban kegiatan usaha tidak berizin	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan (fungsi 3) 2. Penegakan peraturan di bidang perizinan usaha <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah penertiban kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dalam setahun</p>

			Tipe Perhitungan: Non Kumulatif
(1)	(2)	(3)	(4)
			SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung Sumber Data: Kecamatan, Satpol PP, BPMPT SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung Sumber Data: Kecamatan, Satpol PP, BPMPT
3.3.	Peningkatan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan/ aset daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Alasan Pemilihan Indikator: 1. Mengimplementasikan fungsi Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya perundang-undangan (fungsi 7) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat mendeskripsikan kualitas pelayanan publik Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung Sumber Data: Kecamatan, Bagian Organisasi Setda
3.4.	Peningkatan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan/ aset daerah	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Alasan Pemilihan Indikator: 1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan 2. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam peningkatan PAD Formulasi Pengukuran: (Pokok PBB dibagi realisasi PBB) se kecamatan dikali 100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung Sumber Data: Kecamatan, DPPKAD
4.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah		
4.1.	Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan instansi pemerintah	Jumlah rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (fungsi 5) 2. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

			fasilitasi pelayanan umum (fungsi 4)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>3. Rapat koordinasi dengan UPTD/ instansi vertikal tingkat kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah rapat koordinasi dengan UPTD/ instansi vertikal tingkat kecamatan dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>
4.2.	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Jumlah rapat koordinasi dengan Kepala Desa/ Perangkat Desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa (fungsi 6) 2. Rapat koordinasi dengan Kepala Desa/ Perangkat Desa sebagai media komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah rapat koordinasi aparat kecamatan dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>
4.3.	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Jumlah pembinaan administrasi desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa (fungsi 6) 2. Pembinaan administrasi desa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4.4.	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi penyusunan APBDesa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa (fungsi 6) 2. Fasilitasi penyusunan APBDesa dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBDesa yang transparan, partisipatif dan akuntabel. <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDesa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>
4.5.	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi penyusunan LKPJ Kepala Desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa (fungsi 6) 2. Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan LKPJ Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel. <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Srumbung</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN DUKUN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganise bagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan Pelayanan Umum dan Perijinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>1.Sesuai Tugas Pokok Kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>2.Perubahan data dokumen KK/ KTP bagi wajib KTP baru.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>1.Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan dibandingkan dengan jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan</p> <p>2. Pelayanan penyelesaian pembuatan KTP, KK diselesaikan dalam jangka 1 (satu) hari sepanjang persyaratan</p>

			administrasi lengkap, benar dan jaringan internet komputer lancar dan peralatan tidak rusak.
(1)	(2)	(3)	(4)
			TipePerhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Dukun Sumber Data: Kecamatan Dukun
2.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	AlasanPemilihanIndikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah FormulasiPengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$ TipePerhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Dukun Sumber Data: Kecamatan Dukun

NAMA SKPD : **KECAMATAN SAWANGAN**
 URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
 FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
1.1	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai Tugas Pokok Kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan}}{\text{jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Sawangan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Sawangan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Sawangan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Sawangan</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN MUNTILAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Cakupan pelayanan umum dan perizinan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah dokumen yang diterbitkan}}{\text{Target dokumen yang diterbitkan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Muntilan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Muntilan</p>
2.	Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi.		
2.1	Peningkatan fungsi koordinasi, sinergisasi dan	Prosentase peningkatan intensifikasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan penerimaan</p>

	sinkronisasi di tingkat kecamatan.	PBB.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui Intensifikasi PBB.
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Muntilan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Muntilan</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN MUNGKID**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan utama otonomi daerah dalam wilayah kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pelayanan umum dan perijinan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Pelayanan umum dan perijinan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab: KecamatanMungkid</p> <p>Sumber Data: KecamatanMungkid</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan utama otonomi daerah dalam wilayah kecamatan, Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Mungkid</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mungkid</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN MERTOYUDAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Memimpin Pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat		
1.1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Cakupan Pelayanan dan Adm Kependudukan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Upaya Peningkatan Capaian Pelayanan Kependudukan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah wajib pelayanan yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Mertoyudan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan</p>
2.	Meningkatkan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi		
2.1	Peningkatan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Upaya Peningkatan Kemandirian Daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Realisasi Pemasukan}}{\text{Pokok Ketetapan}} \times 100\%$</p>

			Tipe Perhitungan: Kumulatif
(1)	(2)	(3)	(4)
			SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Mertoyudan Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan DPPKAD Kab Magelang

- NAMA SKPD : **KECAMATAN TEMPURAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
1.1	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Tempuran</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tempuran</p>
2	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		

2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan peningkatan pelayanan administrasi umum dan perijinan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dengan baik dan secara terpadu
(1)	(2)	(3)	(4)
			Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang ada}}{\text{Jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Tempuran Sumber Data: Kecamatan Tempuran

NAMA SKPD : **KECAMATAN KAJORAN**

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan penataan administrasi kependudukan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perubahan data dokumen KK/ KTP dan wajib KTP baru (umur 17 tahun)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah hari dalam penyelesaian penerbitan KK dan KTP. Untuk pembuatan KTP diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sedangkan untuk pembuatan KK dalam jangka waktu 5 (lima) hari sepanjang persyaratan lengkap, benar dan peralatan komputer lancar</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Kajoran</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Kajoran</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN KALIANGKRIK**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan penataan administrasi kependudukan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perubahan data dokumen KK/ KTP dan wajib KTP baru (umur 17 tahun)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah hari dalam penyelesaian penerbitan KK dan KTP. Untuk pembuatan KTP diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sedangkan untuk pembuatan KK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sepanjang persyaratan lengkap, benar dan peralatan komputer lancar</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN BANDONGAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemberdayaan aparatur pemerintah desa		
1.1	Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa	Jumlah Fasilitasi pengisian perangkat desa dan kepala desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>1. Melaksanakan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa</p> <p>2. Fasilitasi pengisian perangkat desa dan Kepala Desa diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam pentahapan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>Jumlah fasilitasi dan monitoring pengisian kepala desa dan / atau perangkat desa dalam 1 tahun</p> <p>Tipe Perhitungan:</p> <p>Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab:</p> <p>Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Kecamatan Bandongan</p>
2.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah		
2.1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Fasilitasi kegiatan penyusunan APBDesa dan	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>1. Melaksanakan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa</p>

		LKPJ Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>2. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan LKPJ Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBDesa dan LKPJ Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDesa dan LKPJ Desa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>
		Peningkatan prosentase pelunasan PBB	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 2. Barometer dalam peningkatan realisasi PBB dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Magelang <p>Formulasi Pengukuran: (Prosentase realisasi pelunasan PBB tahun berjalan dikurangi prosentase realisasi pelunasan PBB tahun sebelumnya) dibagi prosentase realisasi pelunasan PBB tahun sebelumnya dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Bandongan dan DPPKAD</p>
		Intensifikasi pengelolaan administrasi desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan administrasi desa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Mengimplementasikan fungsi membina penyelenggaraan pemerintah desa (fungsi 6) <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dalam setahun</p>
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Mewujudkan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi local		
3.1	Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Memberikan gambaran tentang prosentase penduduk yang tertib dalam kepengurusan dokumen-dokumen perizinan maupun non perizinan</p> <p>Formulasi Pengukuran: jumlah pendaftaran dokumen-dokumen perizinan dan non perizinan</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMPPT</p>
4	Mewujudkan koordinasi dan kerjasama pemerintahan		
4.1	Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan	Jumlah data monografi dan profil desa yang masuk	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (fungsi 5) 2. Memberikan gambaran tentang data desa secara valid <p>Formulasi Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data monografi desa tiap bulan 2. Jumlah data profil desa tiap tahun <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan, Bapermaspuan dan KB, Bappeda dan Desa</p>
4.2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Maksimal.	penilaian terhadap hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (fungsi 7) 2. Memberikan gambaran kualitas pelayanan kepada masyarakat <p>Formulasi Pengukuran: Penilaian IKM</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan, Bagian Organisasi Setda</p>
(1)	(2)	(3)	(4)

		Jumlah kegiatan sosialisasi pengajuan izin	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (fungsi 7) 2. Penegakan peraturan di bidang perizinan usaha <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan sosialisasi dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan, Satpol PP, BPMPPT</p>
5.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat		
5.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fungsi 1) 2. Peningkatan swadaya masyarakat mendukung pembangunan desa <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah swadaya/jumlah proyek yang terealisasi x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan dan desa</p>
		Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fungsi 1) 2. Meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan dan desa</p>
(1)	(2)	(3)	(4)

5.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan.	Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fungsi 1) 2. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan merupakan isu strategis <p>Formulasi Pengukuran: jumlah anggota PKK aktif/jumlah perempuan usia produktif di Kecamatan Bandongan x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan dan desa</p>
6.	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah.		
6.1	Meningkatkan informasi potensi unggulan	jumlah sektor unggulan yang terpublikasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fungsi 1) 2. ketersediaan informasi mengenai potensi lokal <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah sektor unggulan yang dipublikasikan dalam 1 tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan, Bappeda, BPMPT, dan desa</p>
7.	Meningkatnya Kondusivitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum		
7.1	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Jumlah petugas keamanan (linmas) Kecamatan yang terlatih	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban (fungsi 2) 2. Kegiatan pembinaan kepada petugas keamanan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah anggota linmas desa yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Bandongan</p> <p>Sumber Data: Kecamatan</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN CANDIMULYO**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Tingkat kepuasan masyarakat		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan dalam tahun berjalan</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Candimulyo</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Candimulyo</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya kualitas kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Prosentase peningkatan intensifikasi PBB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Karena termasuk target PAD Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pokok pajak yang tertagih}}{\text{keseluruhan pokok pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Candimulyo</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Candimulyo</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN PAKIS**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
1.1.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa	Jumlah fasilitasi penyusunan APBDesa	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitasi penyusunan APBDesa dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBDesa yang transparan, partisipatif dan akuntabel</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDesa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Pakis</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah fasilitasi penyusunan LKPJ Desa	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan LKPJ Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Pakis</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis</p>
		Prosentase peningkatan penerimaan PBB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD, dengan dikelolanya PBB oleh Pemerintah Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Pakis</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis</p>
2	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat mendiskripsikan kualitas pelayanan publik</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Pakis</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis, Bagian Organisasi Setda</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN NGABLAK**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		
1.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat mendeskripsikan kualitas pelayanan publik</p> <p>Formulasi Pengukuran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Kecamatan Ngablak, Bagian Organisasi Setda</p>
2	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
2.1	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Ngablak</p> <p>Sumber Data:</p>

			Kecamatan Ngablak
--	--	--	-------------------

- NAMA SKPD : **KECAMATAN GRABAG**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui penerapan budaya kerja yang professional, bersih, beretika dan berwibawa.	Jumlah fasilitasi penyusunan APBDesa	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitasi penyusunan APBDesa dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBDesa yang transparan, partisipatif dan akuntabel</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDesa dalam setahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Grabag</p>

			Sumber Data: Kecamatan Grabag
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah fasilitasi penyusunan LKPJ Desa	Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan LKPJ Desa yang transparan, partisipasif dan akuntabel Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dalam setahun Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Grabag Sumber Data: Kecamatan Grabag
		Jumlah fasilitasi penyusunan LKPJ Desa	Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan LKPJ Desa yang transparan, partisipasif dan akuntabel Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dalam setahun Tipe Perhitungan: Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Grabag Sumber Data: Kecamatan Grabag
		Prosentase peningkatan penerimaan PBB	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD, dengan dikelolanya PBB oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{pokok penetapan PBB}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Grabag Sumber Data: Kecamatan Grabag
Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat.			

	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat mendiskripsikan kualitas pelayanan publik Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)
			Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Grabag Sumber Data: Kecamatan Grabag, Bagian Organisasi Setda

- NAMA SKPD : **KECAMATAN TEGALREJO**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya manajemen dan Sistem Pemerintahan Daerah yang baik, modern dan demokratis..		
1.1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan dibandingkan dengan jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Tegalrejo</p> <p>Sumber Data:</p>

			Kecamatan Tegalrejo
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya manajemen dan sistem Pemerintahan Daerah yang baik, modern dan demokratis		
2.1	Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah	Prosentase peningkatan intensifikasi PBB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Termasuk target PAD Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pokok pajak yang tertagih}}{\text{keseluruhan pokok pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Tegalrejo</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN SECANG**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat		
1.1.	Meningkatkan tingkat kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat	Cakupan Optimalisasi Pemanfaatan Pelayanan PATEN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mobilitas yang menunjang Pelayanan Publik dan Penerbitan Dokumen Kependudukan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pelayanan}}{\text{jumlah jenis pelayanan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Secang</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>
2.	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola Pemerintah yang baik dan bebas KKN		
2.1	Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Cakupan Optimalisasi Penerimaan PBB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh Pemerintah Daerah</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah realisasi penerimaan PBB}}{\text{jumlah pokok penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Secang</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>

- NAMA SKPD : **KECAMATAN WINDUSARI**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- FUNGSI : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengembangkan Potensi Sumber Daya Perencanaan dan Pemberdayaan		
1.1.	Pengembangan potensi sumber daya perencanaan dan pemberdayaan	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah keterlibatan perempuan dalam pembangunan}}{\text{jumlah lembaga perempuan yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Windusari</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>
2.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		
2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan pelayanan PATEN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pelayanan}}{\text{jumlah jenis pelayanan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Windusari</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>
3.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas KKN		
3.1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Cakupan realisasi pelunasan PBB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan PAD dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah realisasi pemasukan PBB}}{\text{jumlah penetapan PBB}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kecamatan Windusari</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>

- NAMA SKPD : **KELURAHAN SAWITAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- FUNGSI : 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Memberdayakan masyarakat
 3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
 4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Membina lembaga kemasyarakatan kelurahan
 7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan		
1.1.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan PAD di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pokok pajak yang tertagih}}{\text{jumlah keseluruhan pokok pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kelurahan Sawitan</p> <p>Sumber Data: Kelurahan Sawitan</p>

- NAMA SKPD : **KELURAHAN MENDUT**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- FUNGSI : 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Memberdayakan masyarakat
 3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
 4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Membina lembaga kemasyarakatan kelurahan
 7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Manajemen dan Sistem Pemerintah Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis		
1.1.	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan PBB tercapai	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Termasuk PAD di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pokok pajak tertagih}}{\text{Jumlah keseluruhan pokok pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kelurahan Mendut</p> <p>Sumber Data: Kelurahan Mendut</p>

- NAMA SKPD : **KELURAHAN MUNTILAN**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- FUNGSI : 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Memberdayakan masyarakat
 3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
 4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Membina lembaga kemasyarakatan kelurahan
 7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi		
1.1.	Peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi	Prosentase peningkatan pajak bumi dan bangunan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pemasukan PBB untuk meningkatkan PAD</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah bayar wajib pajak}}{\text{jumlah total pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kelurahan Muntilan</p> <p>Sumber Data: Kelurahan Muntilan</p>

- NAMA SKPD : **KELURAHAN SUMBERREJO**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- FUNGSI : 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Memberdayakan masyarakat
 3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
 4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Membina lembaga kemasyarakatan kelurahan
 7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan		
1.1.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pencapaian target dalam pelunasan PBB	Prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan PAD di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pokok pajak yang tertagih}}{\text{jumlah keseluruhan pokok pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kelurahan Sumberrejo</p> <p>Sumber Data: Kelurahan Sumberrejo</p>

- NAMA SKPD : **KELURAHAN SECANG**
- URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- FUNGSI : 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Memberdayakan masyarakat
 3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
 4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Membina lembaga kemasyarakatan kelurahan
 7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak		
1.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Prosentase peningkatan pendapatan PBB (intensifikasi PBB)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Karena termasuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah pokok pajak yang tertagih}}{\text{jumlah keseluruhan pokok pajak}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Kelurahan Secang</p> <p>Sumber Data: Kelurahan Secang</p>

- NAMA SKPD : **BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
- URUSAN : Perizinan
- TUGAS POKOK : Menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggung jawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing		
1.1.	Produk unggulan yang ada di Kabupaten Magelang	Investasi Kabupaten Magelang	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merupakan SPM Dalam rangka peningkatan PMDN di Kabupaten Magelang <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{jumlah PMDN th } n}{\text{jumlah PMDN th } n - 1} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPMPT</p> <p>Sumber Data: BPMPT</p>

NAMA SKPD : **BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**

URUSAN : Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUGAS POKOK : Menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta penyelenggaraan urusan ketahanan pangan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat ketahanan pangan menuju kedaulatan Pangan		
1.1.	Meningkatkan jumlah ketersediaan dan cadangan pangan di masyarakat	jumlah kebutuhan kalori dan protein yang terpenuhi masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: Ketersediaan Kalori : $\frac{\text{ketersediaan energi/kapita/hr(kkal)}}{2200 \text{ kkal}} \times 100\%$ Ketersediaan Protein : $\frac{\text{ketersediaan protein/kapita/hr(gram)}}{2200 \text{ kkal}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: BPPKP</p>
	Meningkatkan alur distribusi dan akses pangan oleh masyarakat	Penguatan cadangan pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jenis cadangan pangan kabupaten(ton)}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan:</p>

			Non Kumulatif
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data survey konsumsi pangan masyarakat</p>
	Meningkatkan distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{ketersediaan informasi komoditas, lokasi dan waktu}}{3} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data produksi, konsumsi, harga komoditas</p>
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{2 - \text{realisasi harga rata - rata komoditas}}{\text{target harga rata - rata komoditas}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data survey lokasi, frekuensi pemantauan harga komoditas pangan</p>
	Meningkatnya keaneka ragaman dan keamanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{konsumsi pangan riil masyarakat}}{\text{standar konsumsi pangan nasional}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data survey jenis pangan yang diproduksi oleh kelompok</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah komoditas pangan yang aman}}{\text{jumlah sampel komoditas pangan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Hasil uji laboratorium keamanan pangan</p>
	Menangani kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah desa rawan pangan yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh desa rawan pangan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data desa rawan pangan</p>
2.	Mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang handal, dinamis serta berorientasi bisnis		
	Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan pendapatan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan petani	peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama pertanian, perikanan, kehutanan unggulan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan tugas dan fungsi utama BPPKP yaitu peningkatan kapasitas SDM petani</p> <p>Formulasi Pengukuran: Produksi : jumlah produksi komoditas pertanian dalam satu tahun</p> <p>Produktivitas : $\frac{\text{jumlah produksi komoditas pertanian}}{\text{luas lahan komoditas pertanian}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data Magelang dalam angka BPS</p>
3	Mewujudkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang kuat, dinamis dan mandiri yang berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi		
	Meningkatnya jumlah kelembagaan pelaku utama yang berfungsi sebagai kelas belajar,	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan tugas dan fungsi utama BPPKP yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga petani</p>

	wahana kerjasama dan unit produksi		
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kelompok tani kelas lanjut, madya dan utama di Kabupaten Magelang</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Hasil survey dan penilaian kelas kelompok tani</p>
4.	Mewujudkan kelembagaan penyuluhan sebagai pusat informasi teknologi dan informasi pasar pertanian, perikanan dan kehutanan		
	Meningkatkan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama pelaku utama dan lembaga pelaku utama dengan lembaga usaha dan keuangan	Peningkatan pertumbuhan kerjasama dengan pelaku usaha	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan tugas dan fungsi utama BPPKP yaitu mengembangkan jaringan kemitraan petani</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah pelaku utama/lembaga pelaku utama yang menjalin kerjasama usaha</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPPKP</p> <p>Sumber Data: Data Jaringan Kemitraan usaha petani dan kelompok tani</p>

- NAMA SKPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
- URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- TUGAS POKOK : 1) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 8) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram.		
1.1.	Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Alasan Pemilihan Indikator: Pengukuran indikator salah satu siklus kebencanaan (prabencana) Formulasi Pengukuran:

(1)	(2)	(3)	(4)
			$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan kebencanaan}}{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPBD</p> <p>Sumber Data: Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD</p>
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengukuran indikator salah satu siklus kebencanaan (tanggap darurat bencana)</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan tanggap darurat}}{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPBD</p> <p>Sumber Data: Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD</p>
		Cakupan dokumen penanggulangan bencana	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengukuran indikator kelembagaan penanggulangan bencana</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun BPBD kab. Magelang}}{\text{Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang wajib disusun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPBD</p> <p>Sumber Data: BPBD</p>
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengukuran indikator salah satu siklus kebencanaan (pasca bencana)</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana}}{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BPBD</p> <p>Sumber Data: Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

ZAENAL ARIFIN